TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI TEPAT PADA WAKTUNYA

(Studi Kasus : Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri I Lubuk Pakam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ERWANA

NPM: 00 840 0037 BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM MEDAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penulis:

Nama

ERWANA

NIM

: 00 840.0037

Jurusan

Hukum Keperdataan

Judul Skripsi

TINIALIAN TERVARA

TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKIJM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN YANG TIDAK

PEMBORONGAN PEKERJAAN SELESAI TEPAT PADA WAKTUNYA

II Panitia Pembimbing Sknpst

1 Nama

Jabatan

Tgl Persetujuan

H ABDUL LAWALIHSB, SH

Pembimbing

Tanda Tangan

2. Nama

Jabatan

Tgl. Persetujuan

SRI USWATI, SH, Sp.N

Pembimbing II

Tanda Tangan

III. Panitia Ujian Sknpsi

1. Ketua

: H Abdul Muis, SH, MS

2 Sekretaris

: HJ Rahmaniar, SH, M.Hum

3. Penguji I

H Abdul Lawali Hsb, SH

4 Penguji II

Sri Uswati, SH. Sp.N

Disetujui Dekan Fakultas Hukum

s Medan Area

SH, M. Hum)

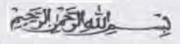
Ketua Jurusan

Huklum Keperdataan

(H. Abdul Muis, SH, MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuhia-Nya kepada penulis sehingga penulisan karya ilmiah dalam bentuk skrpsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini adalah merupakan rangkaian kewajiban-kewajiban penulis di dalam perkuliahan terutama untuk mencapai ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah "TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI TEPAT PADA WAKTUNYA (Studi Kasus Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri 1 Lubuk Pakam)". ".

Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Lawali Hsb, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

bu Sri Uswati, SH, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

Kepada Bapak Kepala Dinas Permukiman, Pengembangan Wilayah dan

Pertambangan Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak membantu dalam

pengumpulan data;

- Bapak dan Ibu serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas

Medan Area.

- Civitas akademika serta rekan-rekan Rismalida, Tiorista haloho, Husnul

Lubis, Afrida.Lubis, Krista Siagian, Nurhaida Nst yang telah banyak

membantu dan memberi dukungannya dalam penulisan ini.

Kedua orang tua, penulis serta saudara-saudara penulis yang telah

memberikan dukungan dan bantuan moril kepada penulis sehingga

terselesaikan tulisan ilmiah ini.

Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2004

Penulis

ERWANA

DAFTAR ISI

			halamar
KATA	PEN	GANTAR	i
DAFTA	R IS	***************************************	iii
BAB I.	•	PENDAHULUAN	1
		A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
		B. Alasan Pemilihan Judul	4
		C. Permasalahan	6
		D. Hipotesa	6
		E. Tujuan Pembahasan	7
		F. Metode Pengumpulan Data	8
		G. Sistematika Penulisan	8
BAB	II.	PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG PERJANJIAN	10
		A. Pengertian Perjanjian	10
		B. Syarat Sah Suatu Perjanjian	16
		C. Jenis-Jenis Perjanjian	24
		D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
BAB	111	PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UMUMNYA	34
DAD	1114	A. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	34
		B. Perjanjian-Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan	38
		C. Resiko Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	41

	D. Alasan-Alasan Berhenti Atau Berakhirnya Suatu Perjanjian		
	Pemborongan Pekerjaan	45	
BAB IV.	PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA		
	PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH UMUM	49	
	A. Terjadinya Perjanjian Pemborongan Kerja Pembangunan		
	Sekolah Menengah Umum	49	
	B. Tanggung Jawab Pemborong Atas Keterlambatan		
	Penyelesaian Pekerjaan	55	
	C. Berakhirnya Pemborongan Kerja Pembangunan Sekolah		
	Menengah Umum	60	
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	62	
	A. Kesimpulan	62	
	B. Saran	64	
DAFTARF	PUSTAKA		
LAMPIRAN	N-I AMPIRAN		

BABI

PENDAHULUAN

Suatu akibat dari pelaksanaan pembangunan itu adalah semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang terasa harus dipenuhi. Pada awalnya kebutuhan tersebut tidaklah merupakan kebutuhan yang mendesak, tetapi karena percepatan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, maka tidak dapat dielakkan kebutuhan yang tidak mendesak tersebut untuk saat sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak. Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja hanya pada sisi kebutuhan perseorangan, tetapi untuk saat sekarang ini kebutuhan tersebut mencakup suatu organisasi. Baik itu organisasi yang oersifat melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mementingkan imbalan maupun suatu organisasi yang memberi keuntungan. Organisasi pada bagian kedua tersebut dapat berbentuk badan-badan usaha.

Dari satu sisi lain, pemenuhan akan kebutuhan tersebut dipandang oleh badan-badan usaha sebagai suatu lahan bisnis yang memberi keuntungan. Maka saat sekarang ini dapat dilihat banyak tumbuh dan berkembangnya badan-badan usaha yang berbentuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perseorangan maupun oleh suatu organisasi, termasuk halnya usaha-usaha yang dilakukan dalam hal pembangunan sarana umum, seperti rumah sekolah.

Pelaksanaan pengadaan sarana-sarana umum seperti pembangunan rumah sekolah adalah merupakan bidang usaha pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa.

Agar pelaksanaan pembangunan rumah sekolah tersebut mencapai hasil yang maksimal maka pemerintah daerah menyerahkan pelaksanaan pembangunan rumah sekolah pada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik itu terbadap jumlah biaya pembangunan rumah sekolah yang dimaksudkan maupun juga kebutuhan bahan material yang disediakan.

Atau dengan perkataan lain, dalam hat pelaksanaan pembangunan rumah sekolah, pemerintah mengadakan tender, dan bagi perusahaan yang memenangkan tender tersebut maka pemerintah menyerahkan pekerjaan pembangunan rumah sekolah yang dimaksudkan. Dengan demikian ada dua pihak yang sangat berkepentingan dalam hat ini yaitu pemerintah sebagai pemberi pekerjaan serta perusahaan penerima pekerjaan sebagai pihak yang menyelenggarakan pembangunan rumah sekolah yang dimaksudkan.

Dalam hal hubungan pembangunan rumah sekolah ini tidaklah pula dapat memisahkan diri dari suatu tatanan permasalahan keperdataan terutama dalam lapangan hukum perjanjian. Karena pelaksanaan suatu pembangunan rumah sekolah dilaksanakan tentulah pula didahului dengan suatu pengikatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan pemberi pekerjaan maupun pihak perusahaan yang membuatnya. Dasar yang utama perihat

pengaturan tentang pemborongan pekerjaan terdapat di dalam Pasal 1601 b KUH Perdata.

Suatu hal yang menarik dari telaah ini adalah apabila ternyata pihak yang menerima pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana waktu yang diperjanjikan sehingga secara langsung ia telah melakukan wanprestasi. Dengan tidak terselesaikannya pekerjaan sebagaimana waktu yang ditentukan maka pihak pemberi kerja dapat mengambil tindakan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul " TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI TEPAT PADA WAKTUNYA (Studi Kasus Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri 1 Lubuk Pakam)".

Dari judul di atas sebenamya dapat dilihat apa yang menjadi arah pembahasan penulis, tetapi meskipun demikian penulis merasa perlu juga memberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diuraikan di atas.

- " Tinjauan " adalah telaah atas sesuatu objek yang diteliti.
- " Akibat Hukum ", diartikan sebagai suatu sebab akibat dari segi hukum terhadap sesuatu hal yang telah diperjanjikan sebelumnya
- "Pekerjaan " dalam hal ini adalah pemborongan pekerjaan.

"Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dimana pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai hasil pekerjaan tersebut. ¹

"Yang Tidak Selesai Tepat Pada Waktunya ", adalah suatu keadaan dimana hasil pekerjaaan yang diperjanjikan tidak dapat selesai sebagaimana diperjanjikan.

"Studi Kasus Lanjutan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMU Negeri 1 Lubuk Pakam ", adalah merupakan objek pelaksanaan penelitian, dimana diartikan sebagai suatu kegiatan yang merupakan jenis pekerjaan konstruksi berupa bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat dan sarana pendidikan.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah di sekitar bagaimana suatu kegiatan pelaksanaan pemborongan pekerjaan pembangunan sekolah yang dikelola oleh Pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut tidak selesai sebagaimana diperjanjikan sehingga membawa tanggung jawab bagi penerima pekerjaan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan pembangunan sekolah sebagaimana objek penelitian dalam Hukum Perjanjian dikelompokkan sebagai perjanjian pemborongan kerja.

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 65.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi don Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Kartono, *Perjanjian Jual-Beli Menurut KUH Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, jakarta, 1974.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hukum Perdata Tentang Perikatan, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- ————, Pendalaman Materi Hukum Perikatan, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Soedibyo, *Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Sri. Soedewi Masjhoen Sofwan, Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Sundari Arie, *Peraturan dan Ketentuan Penggunaan Bank Garansi*, Bahan Seminar, Jakarta, 15 Juni 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wirjano Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur, Bandung, 1984.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG



SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK)

NOMOR

1 01/SPP/PSP/OS/2002

TANGGAL

: 15 MEL 2002

NAMA PROYEK

PEMBINAAN SARANA PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN

: 2002

NAMA PEKERJAAN

LANCUTAN REMABILITASI PEMBANGUNAN SMU NEGERI I

LUBUK PAKAM

LOKAS!

: KECAMATAN LUBUK PAKAM

PELAKSANA

CV. PENAMBANGAN JAYA

ALAMAT

I PASAR V KELURAHAN LUBUK PAKAM

NILAI KONTRAK

: Rp. 920,575,000.00

DINAS PERMUKIMAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN DELI SERDANG

Alamat Jl. Karya Jasa No. 10 Lutuk Aslam Telp. (061) 7956296

UNIVERSITAS MEDAN AREA